



Sujiwo

## Opini BPK Jadi Ajang Politisasi

Sungai Raya. Pertanggung-jawaban keuangan daerah yang opininya dikeluarkan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), sering dijadikan ajang politisasi lawan politik kepala daerah.

"Sehingga kepala daerah atau bupati sering kewalahan

menghadapinya," kata Ketua DPRD Kubu Raya, Sujiwo, pada wartawan, kemarin.

Sujiwo yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kubu Raya ini, paling krusial adalah ketika BPK RI menyatakan keuangan daerah disclaimer opinion (tidak memberikan pendapat) bahkan hingga kepada ad-

verse opinion (tidak wajar), maka akan terbuka peluang dimanfaatkan.

"Berbagai opini langsung terbentuk di mata masyarakat kalau kepala daerah tidak mampu mengelola keuangan daerah ketika menjalankan amanah masyarakat," tuturnya.

Kebalikannya adalah ketika opini yang diberikan BPK RI berupa qualified opinion (wajar tanpa pengecualian) dan wajar dengan pengecualian (qualified opinion), masyarakat menilai kepala daerah mampu mengelola keuangan daerah. Kondisi ini kalau terus disandarkan

kepada kepentingan politik tertentu tentunya akan menjadi preseden buruk bagi proses pembangunan daerah. "Perlu sikap arif dan bijak dalam menyikapi opini BPK RI, sehingga tidak menjadi polemik baik dari sisi politis atau pun opini masyarakat," ujarnya. (oen)